



PELEBARAN JALAN BANTUL

Pemkab Pastikan Tak Ada Relokasi untuk PKL

SEWON—Pemkab Bantul dipastikan tidak menyiapkan lokasi baru untuk sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Gapura Kota Bantul sampai pertigaan cepit.

Pasalnya, dari beberapa kali sosialisasi yang dilakukan, para PKL yang saat ini menempati lokasi rencana pelebaran jalan tersebut, menyatakan siap untuk pindah dan tidak lagi berjualan di lokasi tersebut. "Mereka [PKL] kan mau menerima. Semua mau mendukung proyek pelebaran jalan tersebut. Selama ini kan PKL itu tidak berizin sehingga kami tidak berkewajiban mencari lokasi baru," kata Kepala Satpol PP Bantul Jati Bayu Broto, Kamis (24/4).

Jati menyebutkan selama ini PKL tersebut berdiri dan berjualan di ruas

jalan tersebut hanya sementara, dan menempati lokasi yang tidak akan digunakan untuk kepentingan umum.

Ketika lokasi tersebut, digunakan untuk kepentingan umum, maka PKL tersebut harus rela untuk pergi dan berpindah lokasi jualan. "Sampai saat ini juga tidak ada yang mengajukan komplain. Soal pembersihan, nanti kami menunggu koordinasi dari DPUPKP Bantul," ujar dia.

Terpisah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul, Zona Paramita mengaku sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan informasi dari DPUPKP terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan yang ditargetkan digelar 2025.

Oleh karena itu, DKUKMPP Bantul belum bisa memastikan ihwal relokasi PKL yang ada di sepanjang Gapura Kota Bantul sampai pertigaan cepit. "Kami lihat dahulu seperti apa *master plan* pembangunannya. Untuk itu kami belum bisa pastikan," katanya.

Sekadar diketahui, saat ini Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng DIY telah melakukan pengukuran di lokasi pelebaran jalan, serta bersiap melakukan lelang proyek senilai Rp17 miliar untuk jalan sepanjang 920 meter tersebut.

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta menyatakan pelebaran jalan tersebut tidak akan menggusur rumah warga. Dengan begitu tidak ada penggusuran dan pembayaran ganti rugi tanah

kepada warga. "Untuk lahan warga yang terdampak, hanya beberapa terkena di bagian tritisan rumah warga kena," kata Aris.

Untuk tritisan rumah warga yang terkena proyek pelebaran jalan, Aris memastikan hal itu tidak ada masalah. Sebab, warga menerima dan siap apabila teras mereka dibongkar untuk pelebaran jalan tersebut. "Kami sendiri sudah sosialisasi kepada mereka. Mereka menerima dan tidak ada masalah," lanjut Aris.

Begitu juga untuk satu bidang lahan milik Sultan Grond yang ada di Jalan Bantul, Aris menyebut telah berkoordinasi dengan pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat agar proyek pelebaran jalan tetap terlaksana. (Jumall)